

PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KONDISI *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN

Godeliva Poluan

Paskah Ika Nugroho

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

paskah@staff.uksw.edu

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance dan kondisi financial distress terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Faktor-faktor yang digunakan untuk mekanisme corporate governance adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan komisaris, dan komite audit. Penelitian menggunakan data sekunder dari laporan tahunan 2010 – 2012 perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel terdiri dari 47 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, dewan komisaris dan kondisi financial distress memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Sementara itu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan sukarela secara signifikan.

Kata kunci: corporate governance, financial distress, pengungkapan sukarela.

Abstract

This study examines the mechanism of corporate governance and financial distress conditions on the voluntary disclosure in the annual report. Elements of mechanism corporate governance that are used consist of managerial ownership, institutional ownership, independent commissioners, board of commissioners, and audit committees. Research using secondary data from 2010 – 2012 annual reports of various companies manufacturing industrial sectors and consumer goods contained in the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sampling method used in this study was purposive sampling. The sample consists of 47 companies. The results show that the independent commissioners, board of commissioners, and financial distress condition have a significant effect on voluntary disclosure. While managerial ownership, institutional ownership, and audit committees does not significantly influence voluntary disclosure.

Keywords: corporate governance, financial distress, voluntary disclosure.

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan melakukan pelaporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban kepada pihak-pihak diluar perusahaan yang berkepentingan seperti investor, kreditur dan pengguna lainnya. Pelaporan keuangan perusahaan meliputi laporan keuangan dan laporan tahunan. Laporan tahunan diterbitkan perusahaan setiap tahun untuk memberikan informasi keuangan maupun non keuangan. Laporan tahunan merupakan media utama penyampaian informasi oleh manajemen perusahaan kepada pihak diluar perusahaan.

Semakin ketatnya persaingan, perusahaan semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya, salah satunya dengan banyaknya informasi yang diungkapkan pada laporan tahunan mereka (Achmad dan Primastuti, 2012). Kualitas informasi yang diberikan perusahaan dapat dilihat dari luas pengungkapan laporan

yang diterbitkan oleh perusahaan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan harus memadai agar pengguna dapat membuat keputusan yang tepat. Perusahaan diharapkan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan sehingga dapat membantu para pengambil keputusan seperti investor, kreditur, dan pemakai informasi lainnya untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang selalu berubah. Informasi yang diberikan oleh suatu perusahaan dapat berupa informasi wajib yang harus dipenuhi karena suatu peraturan atau yang disebut sebagai pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) serta informasi sukarela diluar informasi wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau disebut sebagai pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Wardani, 2012).

Setelah beberapa perusahaan besar mengalami keruntuhan akibat krisis, timbul keinginan untuk meningkatkan transparansi dan

perlindungan pemegang saham minoritas sehingga pengungkapan sukarela perusahaan menerima banyak perhatian dalam beberapa waktu terakhir (Khan, 2012). Luas pengungkapan sukarela berbeda untuk tiap perusahaan. Perusahaan akan *mengungkapkan good news* maupun *bad news* dalam pengungkapan sukarela (Dharma dan Nugroho, 2013). Gantyowati dan Nugraheni, 2014 menyatakan ketika perusahaan memiliki *good news*, perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih banyak untuk menarik para investor, tetapi ketika perusahaan sedang mengalami kondisi *financial distress*, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang terbatas. Hal ini berarti perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih sedikit ketika perusahaan mengalami kondisi *financial distress*.

Pengungkapan sendiri merupakan salah satu prinsip dalam sistem tata kelola perusahaan (*coporate governance*), yaitu transparansi (Achmad dan Primastuti, 2012). Manajemen harus transparan dalam mengelola perusahaan untuk menghindari konflik kepentingan dengan *shareholders* sebagai pemilik perusahaan (Dharma dan Nugroho, 2013). Penerapan *corporate governance* merupakan salah satu alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengungkapkan informasi keuangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengungkapkan sisi tentang pengungkapan sukarela sudah banyak dilakukan, tetapi belum banyak penelitian yang membahas mekanisme *corporate governance* dan kondisi *financial distress* yang dikaitkan dengan pengungkapan sukarela.

Ada berbagai macam pemicu yang memungkinkan perusahaan memilih luas pengungkapan sukarela mereka. Li & Qi (2008) menemukan bahwa Perusahaan dengan tingkat manajerial yang tinggi memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang tinggi. Jika perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi maka manajer akan lebih terkonsentrasi tentang keuntungan dari *shareholders*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khan (2013) menunjukkan bahwa perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan sedikit

melakukan pengungkapan sukarela dan perusahaan yang berkonsentrasi dengan kepemilikan instutisional akan mendukung pengungkapan sukarela yang lebih.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2009) menguji pengaruh kondisi *financial distress* dan mekanisme *corporate governance* yang diprosikan dengan proporsi dewan komisaris, keberadaan komite audit dan kualitas auditor terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh *financial distress* terhadap luas pengungkapan sukarela, untuk variabel proporsi dewan komisaris dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan dari hasil penelitian Wijaya (2009) menunjukkan kualitas auditor mempengaruhi luas pengungkapan sukarela.

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kondisi *financial distress* terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur khususnya sektor aneka industri dan barang konsumsi sebagai objek penelitian. Perusahaan pada kedua sektor ini memiliki tingkat persaingan yang tinggi serta semakin berkembang pesat, dengan tingginya persaingan akan mendukung jatuh bangunnya sebuah perusahaan, sehingga dapat dilihat perusahaan yang berada pada kondisi *financial distress* (Hardiningsih, 2008).

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dharma dan Nugroho (2013). Hasil penelitian Dharma dan Nugroho (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan instutisional dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Untuk variabel dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan kondisi *financial distress* tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pengungkapan sukarela.

Terdapat perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dalam pengukuran variabel *financial distress*, yang dimungkinkan hasil yang digunakan, da

mengukur *financial distress* mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dan Purwanto (2013) dengan menggunakan *interest coverage ratio*.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, yaitu (1) bagi investor saat ini dan potensial investor perusahaan, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi. (2) bagi perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap transparansi pengungkapan sukarela yang akan dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan. (3) bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Teori Agensi

Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan agen, dimana pemilik perusahaan atau investor menunjuk agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan atas nama pemilik. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Teori agensi menyatakan bahwa masing-masing pihak hanya termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dengan agen. Dengan demikian terdapat dua kepentingan berbeda dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha mempertahankan tingkat kemakmuran sebagai kepentingannya masing-masing. Penyatuan kepentingan ini sering menimbulkan masalah keagenan yang sering disebut dengan konflik agensi.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik agensi muncul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian

perusahaan. Pemisahan ini menyebabkan adanya asimetri informasi antara *shareholders* dan manajemen, yang memungkinkan manajemen untuk mengambil kebijakan yang kurang efektif bagi perusahaan dan tidak adanya keterbukaan manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanya pada pemilik perusahaan sehingga tata kelola perusahaan menjadi kurang baik. Berdasarkan keadaan tersebut, dibutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang baik.

Ketika perusahaan yang kepemilikannya tunggal dikelola oleh pemilik, maka pemilik akan membuat keputusan-keputusan yang memaksimalkan kepentingannya (Jensen dan Meckling, 1976). Akan tetapi, apabila pemilik yang sekaligus merangkap sebagai manajer ini menjual sahamnya ke pihak luar, biaya agensi akan muncul karena adanya perbedaan kepentingan. Terdapat tiga macam biaya keagenan :

1. Biaya *monitoring*

Biaya *monitoring* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi aktivitas dan perilaku manajer antara lain membayar auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dan premi asuransi untuk melindungi aset perusahaan.

2. Biaya *bonding*

Biaya *bonding* merupakan biaya yang ditanggung oleh manajer untuk memberi jaminan kepada pemilik bahwa manajer tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.

3. *Residual loss*

Residual loss merupakan biaya yang ditanggung prinsipal untuk mempengaruhi keputusan manajer supaya meningkatkan kesejahteraan prinsipal.

Salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi adalah dengan melakukan pengungkapan informasi perusahaan. Manajemen diwajibkan untuk memberikan laporan periodik kepada pihak *principal* tentang kondisi perusahaan yang dijalankannya.

Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan tanpa c

yang berlaku (Kartika, 2009). Meek, Roberts, dan Gray (1995) menyatakan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi melebihi yang diwajibkan karena dipandang relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen (Hardiningsih, 2008).

Menurut Hardiningsih (2008) pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela apabila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi tersebut lebih besar dari biayanya. Biaya pengungkapan sukarela merupakan seluruh biaya yang berhubungan langsung atau tidak langsung.

Mekanisme Corporate Governance

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, saran untuk mencapai tujuan tersebut serta menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. *Corporate governance* merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk menunjukkan *shareholders value* (Nuryaman, 2009). Bentuk mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu menerapkan *corporate governance* yang baik.

Banhart dan Rosenstein (1998) membagi mekanisme *corporate governance* dalam dua kelompok. Pertama, berupa mekanisme internal untuk mengendalikan perusahaan menggunakan struktur dan proses seperti struktur dewan direksi, dan kepemilikan manajerial. Kedua, mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan mekanisme internal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan hutang. Dalam penelitian ini, mekanisme *corporate governance* akan diprosikan oleh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit.

Menurut Kaihatu (2006) ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme *corporate governance*, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*. Mekanisme *corporate governance* dalam suatu perusahaan akan menentukan kesuksesan suatu perusahaan. Menurut pedoman umum yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) terdapat lima prinsip dasar pengolahan perusahaan yang baik yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.

1. Keadilan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

3. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

4. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

5. Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Melalui pengungkapan sukarela akan mewujudkan asas *corporate governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Financial Distress

Platt dan Platt (2002) mendefinisikan *financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Wardhani, 2007; Hanifah dan Purwanto (2003); Asquith, Gertner, Scharstein (1994) mendefinisikan *financial distress* dengan *interest coverage ratio*. *Financial distress* terjadi ketika perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo.

Perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan memiliki *interest coverage ratio* kurang dari satu (rasio antara laba operasional terhadap biaya bunga). Pemakaian hutang akan menimbulkan biaya bunga dan *interest coverage ratio* menunjukkan apakah kewajiban tersebut dapat dipenuhi dari hasil penggunaan hutang terhadap laba operasional.

Hipotesis

Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Sukarela

Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang tinggi (Li dan Qi, 2008). Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Tingkat kepemilikan manajer dapat mengurangi biaya agensi karena berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan *shareholders* lainnya (Jensen dan Meckling, 1976). Tindakan oportunistis manajer untuk memaksimalkan keuntungan pribadi akan berkurang dengan adanya kepemilikan manajerial dan manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, sehingga pengungkapan sukarela di laporan tahunan semakin luas. Dengan demikian kepemilikan manajerial akan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Nugroho (2013) menemukan bukti bahwa

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Rouf dan Harun (2011) terhadap perusahaan-perusahaan di Bangladesh menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi tidak mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nassir dan Abdullah (2005) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Sukarela

Menurut Soesetio (2008) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Pihak Institusional dapat melakukan pengawasan yang lebih baik daripada pihak manajerial karena pihak institusional memiliki keuntungan lebih untuk memperoleh informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan manajer. Besarnya kepemilikan institusional memberikan tekanan kepada manajer yang ingin terlihat baik di depan pemegang saham dengan memperlihatkan kinerjanya (Nasih dan Hudaya, 2011). Investor institusional yang memiliki proporsi besar dalam kepemilikan saham perusahaan dapat mendesak agar manajer melakukan pengungkapan sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Uyar, Kilic, dan Bayyurt (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional akan meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan di Turkey. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rouf dan Harun (2011) pada perusahaan-perusahaan di Bangladesh.

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Komisaris Independen dan Pengungkapan Sukarela

Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak independen sebagai

komisaris yang terafiliasi. Komisaris yang terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG)

Ketentuan mengenai dewan komisaris independen diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No:Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia harus memiliki dewan komisaris independen yang jumlahnya sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris.

Komisaris independen memiliki akses teratas terhadap informasi yang menyangkut perusahaan. Hal ini disebabkan dewan komisaris independen tidak turut andil dalam kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengungkapan informasi agar dapat mengurangi asimetri informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Barros, Boubaker, dan Hamrouni (2013); Baroko (2007); Al Janadi (2013) menemukan bukti bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

H3: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan Sukarela

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006).

Ukuran dewan komisaris yang besar akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, mengurangi masalah keagenan dan pengungkapan yang lebih transparan (Hasan, 2013). Hal ini karena adanya peningkatan

pengawasan terhadap kinerja manajemen dan transparansi yang lebih besar bagi pemegang saham (Allegrini dan Grecco, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Nugroho (2013) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

H4: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Komite Audit dan Pengungkapan Sukarela

Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit di Indonesia diantaranya adalah Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik untuk memiliki komite audit dan KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di BEJ (Bursa Efek Jakarta) untuk memiliki komite audit.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengelolaan perusahaan (BAPEPAM No: KEP-29/PM/2004). Dengan dibentuknya komite audit diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Komite audit berperan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi.

Tugas utama komite audit mencakup pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan kendali internal. Komite audit juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan obyektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya kendali internal yang lebih baik.

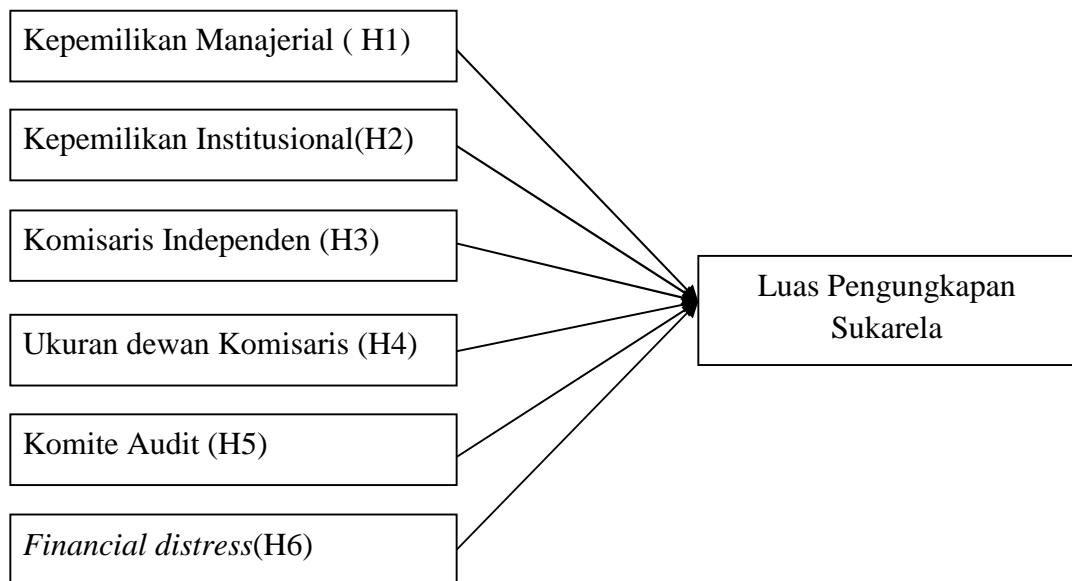
Penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001), menemukan hubungan signifikan positif antara independensi komite audit dan tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Rouf (2010); Achmad (2012) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.

H5: Komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Financial Distress dan Pengungkapan Sukarela

Kondisi *financial distress* terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Watson, *et al*, 2002 dalam Wijaya, 2009 menyatakan apabila perusahaan sedang dalam keadaan yang baik, perusahaan akan dengan sukarela memberikan informasi kepada para investornya. Hal ini berarti perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih sedikit ketika perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Nassir dan Abdullah (2004)

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur khususnya sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdaftar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang mempunyai tujuan atau target tertentu. Adapun kriteria-kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

menemukan bahwa perusahaan yang sedang dalam kondisi *financial distress* cenderung untuk mengungkapkan informasi yang lebih sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh Gantjowati dan Nugraheni (2014) terhadap perusahaan-perusahaan *non-financial* di Indonesia menemukan bahwa kondisi *financial distress* berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

H6: Kondisi *financial distress* berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela

2. Perusahaan yang tidak memiliki data laporan keuangan untuk mengukur ICR dikeluarkan dari sampel.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI. Data yang digunakan berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri atas variabel dependen dan independen. Variabel dependen adalah luas pengungkapan sukarela.

indeks kelengkapan pengungkapan sukarela. Perhitungan indeks kelengkapan pengungkapan sukarela (IPS) dilakukan dengan memberi skor untuk setiap *item* yang diungkapkan, berdasarkan penelitian Nuryaman (2009).

$$IPS = \frac{Q}{S} \times 100 \%$$

Keterangan :

IPS = Indeks kelengkapan pengungkapan sukarela

Q = *Item* kelengkapan pengungkapan sukarela yang disajikan dalam laporan tahunan

S = Semua *item* kelengkapan pengungkapan sukarela yang diharapkan, terdapat pada instrument

Sedangkan variabel independennya adalah :

1. Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana pihak manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan saham yang dimiliki oleh manajemen dibandingkan dengan total saham yang beredar (Ellen dan Juniarti, 2013).
2. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain (Soesetio, 2008). Kepemilikan institusional diukur berdasarkan saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan seluruh saham yang beredar (Ellen dan Juniarti, 2013).
3. Komisaris Independen
Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Hal tersebut diukur dari proporsi jumlah komisaris independen

terhadap jumlah seluruh komisaris (Achmad dan Primastuti, 2012).

4. Ukuran Dewan Komisaris
Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada direksi. Ukuran dewan komisaris diproyeksikan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan (Ujiyanto dan Pramuka, 2007).
5. Komite Audit
Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Indikator yang digunakan adalah jumlah komite audit yang terdapat pada perusahaan sampel (Dharma dan Nugroho, 2013).

6. *Financial distress*
Financial distress terjadi karena perusahaan tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. *Financial distress* diukur atau diprosikan dengan menggunakan *interest coverage ratio*, mengacu pada penelitian Hanifah dan Purwanto (2013). Perusahaan mengalami kondisi *financial distress*, jika *interest coverage ratio* (ICR) perusahaan kurang dari 1.

$$ICR = \frac{\text{Operating Profit}}{\text{Interest Expense}}$$

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model multi regresi linier. Maka model persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$IPS = a + b_1.KMA + b_2.KIN + b_3.RIS + b_4.UDK + b_5.KAU + b_6.FDI + e$$

Keterangan :

IPS = Indeks Pengungkapan

Sukarela

a = Konstanta

KMA = Kepemilikan

Manajerial

KIN = Kepemilikan

Institusional

RIS

UDK	= Ukuran Dewan Komisaris	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang dipublikasikan selama periode 2010 – 2012. Laporan tahunan tersebut diunggah melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari data yang terkumpul kemudian dipilih data sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, diperoleh sampel sebanyak 141.
KAU	= Komite Audit	
FDI	= <i>Financial Distress</i>	
b1,b2,b3,b4,b5,b6	= Koefisien regresi untuk variabel KMA, KIN, RIS, UDK, KAU, dan FDI	
e	= Standar <i>error</i>	

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Objek Penelitian

Tabel 1. Hasil Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Jumlah perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdaftar di BEI dari tahun 2010-2012	59
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap berturut-turut selama tahun 2010 - 2012	(7)
Perusahaan yang tidak memiliki data laporan keuangan untuk mengukur ICR	(5)
Jumlah Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	47
Total sampel yang digunakan dalam penelitian (47 x 3)	141

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel penelitian mengenai pengungkapan sukarela, kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan financial distress dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean
KMA	0,00	0,70	0,0421
KIN	0,22	1,00	0,7350
RIS	0,25	0,80	0,3955
UDK	2,00	11,00	4,4965
KAU	2,00	5,00	3,1135
FDI	-702,35	1112,35	39,1107
IPS	0,17	0,79	0,4215

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan adalah sebesar 42,15%. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang *go public* rata-rata dapat memenuhi 10 item dari 24 item pengungkapan sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2008)

menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2004-2005 melakukan rata-rata pengungkapan sukarela sebesar 34,32%. Tingkat pengungkapan sukarela paling rendah dilakukan oleh PT. Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) dengan tingkat pengungkapan sebesar 17%. Sedangkan yang tertinggi

Farma Tbk. (KAEF) dengan tingkat pengungkapan sebesar 79% pada tahun 2010.

Variabel kepemilikan manajerial (KMA) menunjukkan nilai terendah 0% yaitu sebanyak 34 perusahaan. Nilai tertinggi 70% yaitu oleh PT. Sat Nusapersada Tbk. (PTSN). Sedangkan rata-ratanya sebesar 4,21% yang menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen yaitu para direktur dan dewan komisaris sebesar 4,21% dari total saham yang beredar.

Variabel kepemilikan institusional (KIN) menunjukkan nilai terendah sebesar 22% yaitu oleh PT. Sat Nusapersada Tbk. (PTSN) dan nilai tertinggi sebesar 100% oleh PT Bentoel International Investama Tbk. (RMBA). Sedangkan rata-rata kepemilikan saham perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi oleh pihak institusional adalah sebesar 73,5% dari total saham yang beredar.

Variabel komisaris independen (RIS) menunjukkan nilai terendah sebesar 25% yaitu oleh PT. Unitex Tbk. (UNTX) dan nilai tertinggi sebesar 80% oleh PT. Unilever Tbk. (UNVR). Sedangkan rata-ratanya sebesar 39,55% yang menunjukkan bahwa rata-rata proporsi komisaris independen pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi sebesar 39,55% dari total dewan komisaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi sudah memenuhi ketentuan dimana jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Variabel ukuran dewan komisaris (UDK) paling sedikit 2 orang dimiliki oleh PT. Merck Tbk. (MERK) pada tahun 2010 dan paling banyak dimiliki oleh PT. Astra International Tbk. (ASII) sebanyak 11 orang. Sedangkan rata-rata jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi adalah sebanyak 4 orang. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan telah memenuhi UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena mempunyai paling sedikit 2 orang anggota dewan komisaris.

Variabel komite audit (KAU) paling sedikit 2 orang dimiliki oleh PT. Martina Berto

Tbk. (MBTO) dan PT. Kedawang Setia Industrial Tbk. (KDSI) pada tahun 2010. Jumlah komite audit yang paling banyak dimiliki oleh PT. Indofarma Tbk. (INAF) yaitu sebanyak 5 orang. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi rata-rata memiliki 3 orang komite audit.

Perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* (FDI) ditunjukkan dengan *interest coverage ratio* (ICR) kurang dari 1. Perusahaan dengan ICR paling rendah sebesar -702,35 yaitu oleh PT. Unitex Tbk. (UNTX). Sedangkan rata-rata perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi memiliki ICR sebesar 39,11, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tidak mengalami kondisi *financial distress*.

Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian normalitas menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* tingkat signifikansi sebesar 0,200 (lebih besar dari 0,05) yang berarti data sudah berdistribusi normal. Hasil pengujian multikolinearitas juga menunjukkan data bebas dari multikolinearitas, karena angka *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* (Tol.) lebih dari 0,1. Pengujian heterokedastisitas dengan uji *glejser* juga menunjukkan data bebas dari heterokedastisitas, karena nilai signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05. Selain itu, pengujian autokorelasi dengan Durbin-Watson (DW) juga menunjukkan tidak terdapat masalah autokorelasi (DW = 1,802).

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dalam pengolahan datanya. Analisis ini menggunakan uji statistik t dan uji statistik F dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05.

Penelitian ini menggunakan koefisien determinansi dengan menggunakan nilai *adjusted R-square* untuk mengevaluasi model regresi. Nilai *adjusted R-square* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

R	R square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,491	0,241	0,208	0,12082

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Nilai *adjusted R square* dalam model regresi ini adalah sebesar 0,208 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 20,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 20,8% pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan dipengaruhi oleh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kondisi *financial distress*. Sedangkan sisanya sebesar 79,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini.

a. Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji-F)

Hasil uji-F menunjukkan semua variabel independen yang ada dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengaruh secara simultan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kondisi *financial distress* dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian Regresi secara Simultan

Model	F	Sig.
Regression	7,110	0,000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Berdasarkan hasil uji-F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 7,110 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai probabilitas pengujian lebih kecil dari 0,05 menunjukkan model regresi dapat digunakan secara bersama-sama untuk memprediksi tingkat pengungkapan sukarela (IPS). Hal ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kondisi *financial distress* bersama - sama secara simultan

berpengaruh positif terhadap indeks pengungkapan sukarela.

b. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Tabel 5 menunjukkan hasil uji koefisien regresi secara parsial.

Tabel 5. Hasil Pengujian Regresi secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,188	0,098		1,913	0,058
KMA	-0,048	0,107	-0,041	-0,449	0,654
KIN	0,007	0,072	0,009	0,099	0,922
RIS	0,202	0,099	0,160	2,053	0,042
UDK	0,026	0,006	0,367	4,528	0,000
KAU	0,008	0,024	0,028	0,351	0,726
FDI	0,000	0,000	0,210	2,738	0,007

Variabel Dependen : IPS

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat dari tabel 5 dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{IPS} = 0,188 - 0,048 \text{ KMA} + 0,007 \text{ KIN} + 0,202 \text{ RIS} + 0,026 \text{ UDK} + 0,008 \text{ KAU} + 0,000 \text{ FDI}$$

Hasil pengujian variabel kepemilikan manajerial (KMA) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,449 dengan signifikansi sebesar 0,654. Karena signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan pengungkapan sukarela.

Hasil pengujian variabel kepemilikan institusional (KIN) memiliki t_{hitung} sebesar 0,099 dengan signifikansi sebesar 0,922. Karena signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan pengungkapan sukarela.

Variabel komisaris independen (RIS) yang diukur dengan proporsi komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,053 dengan signifikansi sebesar 0,042 dan koefisien regresi bertanda positif. Signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial

variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Hasil pengujian variabel ukuran dewan komisaris (UDK) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,528 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi bertanda positif. Signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Hasil pengujian variabel komite audit (KAU) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,351 dengan signifikansi sebesar 0,726. Karena signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel komite audit tidak berpengaruh secara signifikan pengungkapan sukarela.

Hasil pengujian variabel *financial distress* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,378 dengan signifikansi sebesar 0,007 dan koefisien regresi bernilai positif. Signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil pengujian, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela tidak dapat diterima. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Dharma dan Nugroho (2013) juga menemukan hasil yang sama dimana kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil yang serupa juga diperoleh oleh Rouf dan Harun (2011) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi tidak mempengaruhi pengungkapan sukarela. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nassir dan Abdullah (2005) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Hal ini disebabkan kepemilikan manajerial pada perusahaan cenderung kecil, maka pihak manajemen tidak punya kendali dalam menentukan informasi apa saja yang harus diungkapkan. Dapat dilihat berdasarkan sampel dalam penelitian ini rata-rata persentase kepemilikan manajerial di perusahaan sampel masih tergolong rendah yaitu 4,21%. Selain itu sebesar 70,34% dari 47 perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini memiliki persentase kepemilikan manajerial 0%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan yang merupakan sampel penelitian pada tahun 2010 KAEF yang memiliki persentase kepemilikan manajerial 0% melakukan pengungkapan sukarela sebanyak 79%, sedangkan PTSN dengan persentase kepemilikan manajerial sebesar 70% hanya melakukan pengungkapan sukarela sebesar 29%. Sementara itu INDF dan GDYR pada tahun 2010 melakukan pengungkapan sukarela sebesar 58% dengan persentase kepemilikan manajerial masing-masing 0% dan 25%.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil pengujian, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela tidak dapat diterima. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma dan Nugroho (2013); Nabor dan Suardana (2014); Gantjowati dan Nugraheni (2014). Perusahaan dengan mayoritas saham dimiliki oleh publik tidak perlu untuk melakukan pengungkapan sukarela secara luas (Dharma dan Nugroho, 2013).

Menurut Nuryaman (2009) beberapa alasan pemegang saham pengendali tidak terlalu tertarik terhadap pengungkapan informasi pada laporan keuangan adalah sebagai berikut : (1) Pemegang saham pengendali tidak terlalu tertarik dengan pengungkapan pada laporan keuangan karena mereka dapat mengakses informasi dan yang diperlukan secara langsung ke perusahaan tanpa melalui laporan keuangan dan laporan tahunan; dan (2) sebagai strategi dalam persaingan, beberapa informasi penting sengaja ditahan oleh manajemen dan atau pemegang saham mayoritas untuk menghindari dimanfaatkannya informasi tersebut oleh pesaing perusahaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan yang merupakan sampel penelitian pada tahun 2011 ASII dan AUTO melakukan pengungkapan sukarela sebesar 67% dengan saham yang dimiliki oleh pihak institusional masing-masing sebesar 50% dan 96%.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil pengujian, proporsi komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bar...

(2007); Al Janadi (2013). Persentase dewan komisaris merupakan variabel yang signifikan dalam menjelaskan pengungkapan sukarela seperti yang diungkapkan oleh Hussan et al. (2005) dalam O'Sullivan, Percy, dan Steward (2008). Temuan tersebut sesuai dengan penelitian ini. Hal itu dikarenakan komisaris independen dapat memberikan masukan kepada dewan direksi yang mungkin tidak sependapat dengan dewan direksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan dewan direksi untuk mendukung komisaris dalam hal melakukan pengungkapan secara luas.

Dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan sampel telah memenuhi peraturan Bapepam, yaitu memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30%. Hal tersebut menunjukkan komisaris independen mampu menunjukkan kinerja yang baik dengan tetap mempertahankan independensinya.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil pengujian, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Nugroho (2013).

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris yang besar dalam perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan sukarela. Semakin banyak dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan akan meningkatkan pengawasan, sehingga dewan komisaris mampu menekan kebijakan direksi untuk melakukan pengungkapan secara lebih luas.

Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil pengujian, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela tidak dapat diterima. Hasil ini konsisten

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma dan Nugroho (2013); Wijaya (2009); Nassir dan Abdullah (2005). Menurut Wijaya (2009) walaupun perusahaan telah memiliki komite audit, namun bila mereka tidak mempunyai keahlian di finansial, maka kemungkinan besar mereka juga tidak akan mampu menghadapi kompleksitas pelaporan keuangan. Dengan kata lain, keberadaan komite audit menjadi tidak efektif dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan yang merupakan sampel penelitian pada tahun 2010 ASII dan UNVR melakukan pengungkapan sukarela sebesar 67% dengan masing-masing memiliki jumlah anggota komite audit 4 dan 3 orang.

Pengaruh Kondisi Financial Distress terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan hasil pengujian, kondisi *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan kondisi *financial distress* berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela diterima. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nassir dan Abdullah (2005) yang menemukan perusahaan yang sedang dalam kondisi *financial distress* akan melakukan pengungkapan sukarela lebih sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh Gantowati dan Nugraheni (2014) terhadap perusahaan *non-financial* di Indonesia menunjukkan hasil yang sama. Hal ini berarti perusahaan yang sedang mengalami kondisi *financial distress* yang tinggi akan melakukan pengungkapan sukarela yang lebih sedikit.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kondisi *financial distress* terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2012.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara simultan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, kondisi *financial distress* berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.
2. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Nugroho (2013); Rouf dan Harun (2011).
3. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Nugroho (2013); Nabor dan Suardana (2014); Gantiyowati dan Nugraheni (2014).
4. Variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barros *et al* (2013); Baroko (2007); Al Janadi (2013).
5. Variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Nugroho (2013).
6. Variabel komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Nugroho (2013); Wijaya (2009); Nassir dan Abdullah (2005).
7. Variabel kondisi *financial distress* berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nassir dan Abdullah (2005); Gantiyowati dan Nugraheni (2014).
8. Penelitian ini menemukan bukti bahwa perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian rata-rata hanya melakukan pengungkapan sebanyak 42,15%. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel rata-rata dapat memenuhi 10 item dari 24 item pengungkapan sukarela.

Implikasi Teoritis dan Terapan

Implikasi Teoritis

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Nugroho (2013). Berdasarkan hasil penelitian, ukuran dewan komisaris secara konsisten berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Secara teoritis penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Nugroho (2013). Untuk variabel komisaris independen, sesuai dengan hasil penelitian konsisten mendukung penelitian yang dilakukan oleh Barros *et al* (2013); Baroko (2007); Al Janadi (2013).

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan secara konsisten kondisi *financial distress* berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nassir dan Abdullah (2005); Gantiyowati dan Nugraheni (2014). Ketika perusahaan mengalami kondisi *financial distress* maka perusahaan berupaya untuk tidak memperlihatkan kondisi tersebut dengan cara mengurangi kelengkapan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.

Implikasi Terapan

Hasil penelitian ini menunjukkan masih rendahnya pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Perusahaan diharapkan melakukan pengungkapan yang lebih luas dan relevan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan tahunan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan akan dijadikan bahan evaluasi untuk menilai kinerja dan p

investor melakukan keputusan untuk berinvestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan memperkuat penelitian yang telah ada sebelumnya. Hasil penelitian ini akan menambah keragaman informasi yang terkait dengan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.

Perusahaan yang memiliki jumlah komisaris yang besar dengan komisaris independen sesuai dengan yang ditetapkan peraturan yang berlaku akan melakukan pengungkapan yang besar pula. Implikasinya perusahaan akan melakukan pengungkapan sukarela yang lebih luas selain yang ditetapkan oleh peraturan. Perusahaan diharapkan meningkatkan jumlah dewan komisaris dan memiliki komisaris independen sesuai dengan peraturan, yaitu minimal 30% dari jumlah dewan komisaris. Dengan kepemilikan dewan komisaris yang besar akan meningkatkan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan asas *corporate governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Perusahaan yang sedang mengalami kondisi *financial distress* akan membuat investor ragu dalam mengambil keputusan berinvestasi di perusahaan tersebut. Implikasinya adalah perusahaan akan melakukan pengungkapan sukarela yang lebih sedikit apabila sedang mengalami kondisi *financial distress*.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini hanya terbatas dengan menggunakan sampel perusahaan industri manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdaftar di BEI, sehingga kurang mewakili seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Periode penelitian hanya tiga tahun, sehingga memungkinkan kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
2. Penggunaan indeks pengungkapan sukarela terbatas pada ada atau tidaknya item yang diungkapkan menurut *checklist*.
3. Penelitian ini hanya menggunakan laporan tahunan untuk memperoleh data terkait pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan.
4. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan 20,8% dari variabel dependen, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan penelitian terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya yang perlu dipertimbangkan :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sampel penelitian dengan memasukkan seluruh jenis industri dan menggunakan periode penelitian lebih dari tiga tahun.
2. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas penggunaan media pelaporan seperti situs *web* perusahaan, media cetak, dan media lainnya.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T dan Primastuti, S. 2012. Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis. *Diponegoro Journal Of Accounting* 1(2) : 1-15.
- Achmad, T. 2012. Dewan Komisaris dan Transparansi: Teori Keagenan atau Teori Stewardship. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 16(1): 1-12.
- Al-Janadi, Y. Rahman, R.A. and Omar, N.H. 2013. Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosures in Saudi Arabia. *Research Journal and Accounting* 4(4).
- Allegrini, M. and Greco, G. 2011. Corporate Boards, Audit Committes and Voluntary Disclosure: Evidence from Italian Listed

- Companies. *Journal Manage Governance* 17: 187-216.
- Asquith, P., Gertner, R. and Scharfstein, D. 1994. Anatomy of Financial Distress: An Examination of Junk-Bond Issuers. *The Quarterly Journal of Economics* 109(3): 625-658.
- Barako, D.G. 2007. Determinants of Voluntary Disclosures in Kenyan Companies Annual Reports. *African Journal of Business* 1(5): 113-128.
- Barnhart, S.W. and Rosenstein, S. 1998. Board Composition, Managerial Ownership, and Firm Performance: An Empirical Analysis. *The Financial Review* 33: 1-16.
- Barros, C. P., Boubaker, S. and Hamrouni, A. 2013. Corporate Governance and Voluntary Disclosure in France. *The Journal of Applied Research* 29(2): 561-577.
- Dharma, C.Y.S. and Nugroho, P.I. 2013. Corporate Governance, Financial Distress, and Voluntary Disclosure. *Proceedings Of the International Conference on Managing Asian Century*.
- Ellen dan Juniarti. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance, Dampaknya Terhadap Prediksi Financial Distress pada Sektor Aneka Industri dan Barang Konsumsi. *Business Accounting Review* 1(2).
- Gantowati, E. dan Nugraheni, R.L. 2014. The Impact of Financial Distress Status and Corporate Governance Structures on the Level of Voluntary Disclosure Within Annual Reports of Firms. *Journal of Modern Accounting and Auditing* 10(4): 389-403.
- Hanifah, O.E. dan Purwanto, A. 2013. Pengaruh Struktur Corporate Governance dan Financial Indicators Terhadap Kondisi Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting* 2(2).
- Hardiningsih, P. 2008. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Voluntary Disclosure Laporan Tahunan Perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 15(1) : 67-79.
- Hassan, M.K. 2012. Corporate Governance Characteristic and Voluntary Disclosure: The Case of UEA Listed Corporations. *The 2013 IBEA, International Conference on Business, Economics, and Accounting* (March). Bangkok-Thailand.
- Ho, S. and Wong, K.S. 2001. A Study of the Relationship between Corporate Governance and the Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 10(2): 139.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. 1976. The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics* 3: 305-360.
- Kaihatu, T.S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 8(1): 1-9.
- Kartika, A. 2009. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Kajian Akuntansi* (Pebruari) : 29 – 47.
- Khan, I. 2012. The Impact of Ownership Structure on Voluntary Corporate Disclosure in Annual Reports: Case of Listed Companies in Fiji. *Global Conference on Business and Finance Proceedings* 7(2).
- Li, H. and Qi, A. 2008. Impact of Corporate Governance on Voluntary Disclosure in Chinese Listed Company. *Corporate Ownership and Control* 5(2) : 360-366.
- Meek, G. K., Roberts, C. B., and Gray, S. J. 1995. Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by U.S., U.K, and Continental European Multinational Corporations. *Journal of International Business Studies* (Third Quarter).
- Nabor, M.K.M. dan ... 2014. Analisis Pengaruh Struktur ...

- Proprietary Cost Terhadap Pengungkapan Sukarela. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(2): 197-209.
- Nasih, M. dan Hudaya, R. 2011. Konservatisme Akuntansi dan Konflik Bonholder-Shareholder pada Perusahaan Non Keuangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 22(3): 193-202.
- Nasir, N.M. and Abdullah, S.N. 2004. Voluntary Disclosure and Corporate Governance Among Financially Distressed Listed Firms in Malaysia. *Financial Reporting, Regulation and Governance*.
- Nuryaman. 2009. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 6(1).
- O'Sullivan, M., Percy, M. and Stewart, J. 2008. Australian Evidence on Corporate Governance Attributes and their Association with Forward Looking Information in The Annual Report. *Journal Manage Governance* 12: 5 – 35.
- Platt, H.D. and Platt, M.B. 2002. Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Cchoice-Based Sample Bias. *Journal of Economic and Finance* 26: 184-199.
- Rouf, M.A. 2010. Corporate Characteristics, Governance attributes and the Extent of Voluntary Disclosure in Bangladesh. *Asian Journal of Management Research*.
- Rouf, M.A. and Harun, M.A. 2011. Ownership Structure and Voluntary Disclosure in Annual Reports of Bangladesh. *Social Science Journal* 5(1): 129-139.
- Santoso, Singgih. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. PT Elex Media Komputindo. 217 – 219.
- Soesetio, Y. 2008. Kepemilikan Manajerial dan Institusional, Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 12(3): 384-398.
- Ujiyanto, M.A. dan Pramuka, B.A. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X* (Juli).
- Uyar, A., Kilic, M. and Bayyurt, N. 2014. Association between Firm Characteristics and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Turkish Listed Companies. *IC* 9(4) : 1080 – 1112.
- Wardani, R. P. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 14(1) : 1-15
- Wardhani, R. 2007. Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 4(1): 95-114.
- Wijaya, R.E. 2009. Keberadaan Corporate Governance dan Kondisi Financial Distress terhadap Voluntary Disclosure. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 13(3) : 395-404.